

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Adanya penyelewengan terhadap pelaksanaan *khittah* Tarbiyah yang lebih cenderung melakukan *ijtihad* politik praktis ketimbang menjalankan perjuangan triologi *khittah* Tarbiyah bukan tanpa sebab. *Ijtihad* politik praktis yang coba dimainkan oleh elit Tarbiyah dalam bentuk perilaku yang dekat dengan kekuasaan tanpa menghiraukan *khittah* organisasi tersebut merupakan sebuah fenomena sosial. Sebagaimana upaya untuk mendeskripsikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan *khittah* perjuangan dan untuk mengetahui, menganalisa serta mengidentifikasi mengapa elit DPD Tarbiyah lebih cenderung melakukan *ijtihad* politik praktis ketimbang menjalankan *khittah* perjuangan Tarbiyah, maka berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat penyelewengan dalam melaksanakan triologi *khittah* Tarbiyah yang dikarenakan kecenderungan perilaku elit Tarbiyah yang dominan melakukan kegiatan politik praktis, dimana para elit Tarbiyah coba menformulasikan perjuangan *khittah* Tarbiyah melalui usaha transaksional di lingkaran kekuasaan.

Yang tidak kalah menariknya adalah kalangan jama'ah Tarbiyah yang terdiri dari anak muda Tarbiyah, akademisi, birokrat, wartawan serta beberapa elit informal yang terdiri dari pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah yang tidak senada dengan elit formal Tarbiyah dan coba mempertahankan kemurnian *khittah*, tidak melalui politik praktis namun perjuangan melalui triologi *khittah* Tarbiyah.

Sebelum peneliti menyimpulkan lebih jauh bagaimana sebenarnya yang menjadi latar belakang elit DPD Tarbiyah lebih cenderung berpolitik praktis ketimbang menjalankan triologi *khittah* Tarbiyah tentu peneliti coba memaparkan sedikit kesimpulan bagaimana pelaksanaan triologi *khittah* oleh DPD Tarbiyah.

*Pertama*, pelaksanaan *khittah* bidang pendidikan DPD Tarbiyah yang secara prinsip dasar memiliki peran penting dalam mengembangkan mengkomodir serta mengkoordinasikan sekolah-sekolah Tarbiyah secara luas tidak terlaksana dengan semestinya. DPD Tarbiyah cenderung mengabaikan peran penting tersebut sehingga berdampak pada penyebaran faham *ahlusunnah wal jama'ah* yang seiringan dengan banyaknya tutup beberapa sekolah-sekolah Tarbiyah dimana dipendidikanlah tradisi keilmuan Tarbiyah Islamiyah yang berbasis pada *I'tikad Ahlusunnah wal-jamaah* dan berfikh pada mazhab Syafi'i dapat terlaksana demi terwujudnya kehidupan manusia berbangsa dan bernegara yang berakhlak mulia.

*Kedua*, pelaksanaan *khittah* dakwah Islamiyah juga memperlihatkan bahwasanya tidak ada keseriusan DPD Tarbiyah dalam menjadikan wadah bagi para pendakwah Da'i dan Dai'iyah dalam mendakwahkan gagasan ide dan konsep yang menjadi ciri khas Tarbiyah serta tidak menjadi suatu sikap sentral di tengah masyarakat dalam memainkan peran strategis dan membangun wacana keagamaan yang berkembang.

*Ketiga*, pelaksanaan *khittah* sosial kemasyarakatan merujuk pada jati diri dan prinsip dasar Tarbiyah maka DPD Tarbiyah seharusnya melaksanakan *khittah* sosial kemasyarakatan dengan meletakkan posisi Tarbiyah menjadi organisasi

yang memajukan kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ekonomi, DPD Tarbiyah terjebak didalam lingkaran transaksional dan tidak memberikan kontribusi yang nyata dalam hal menyelenggarakan dan memajukan usaha ekonomi kemasyarakatan. DPD Tarbiyah terkait hal ini mengedepankan politik transaksional dalam merumuskan pelaksanaan *khittah* sosial kemasyarakatan berharap dengan hal tersebut cita-cita Tarbiyah dapat terlaksana dengan baik.

Kesimpulan singkat mengenai bagaimana sebenarnya dalam pelaksanaan *khittah* Tarbiyah tersebut cukup untuk menggambarkan bahwasanya DPD Tarbiyah secara keorganisasian belum menjadikan triologi *khittah* menjadi prioritas dalam perjuangannya. Adapun yang menjadi alasan utama mengapa DPD Tarbiyah lebih cenderung menjalankan perjuangan melalui politik praktis ketimbang melaksanakan triologi *khittah* Tarbiyah, peneliti menyimpulkan dengan temuan data dan analisis pada bab 5, *Ijtihad* politik praktis yang dimainkan oleh elit DPD Tarbiyah dianggap sebagai amal usaha dalam mewujudkan triologi *khittah* Tarbiyah. Dalam hal ini, elit DPD Tarbiyah percaya perjuangan melalui politik praktis dan masuk kedalam dinamika sosial politik kekuasaan gagasan konsep serta ide-ide Tarbiyah dapat terwujud.

Namun disisi lain kalangan jamaa'ah Tarbiyah yang menilai perjuangan tirologi perjugan *khittah* Tarbiyah tidak harus masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Jama'ah yang terdiri dari akademisi, birokrat dan wartawan yang mempertahankan *khittah* semurni mungkin yang tidak berjuang melalui politik praktis namun fokus pada perjuangan melalui triologi *khittah*. Menariknya dengan harmonisasi yang sudah terbangun dengan baik oleh elit DPD Tarbiyah dalam

lingkaran kekuasaan berdampak pada hubungan elit Tarbiyah dengan aktor politik. Temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwasanya terjadi suatu konstalasi antara *khittah* Tarbiyah dalam lingkaran politik praktis dan mendorong suatu orientasi ekonomi demi kelancaran bisnis individu di dalam lingkaran kekuasaan yang sudah terbangun dengan baik. *Khittah* menjadi tameng dalam melakukan aktifitas politik demi mewujudkan orientasi ekonomi bisnis personal dalam elit DPD Tarbiyah.

Dengan demikian melalui penelitian ini, studi fenomenologi tentang *khittah vs ijtihad* : dilema sikap elit DPD Tarbiyah dalam politik praktis kasus dukungan politik Syekh Shahibul Fadhillah H. Boy Lestari Dt. Palindih pada Pilkada Sumatera Barat tahun 2015 merupakan analisis kritis karena memberikan pandangan tentang apa dan bagaimana sebenarnya yang menjadi latar belakang elit organisasi keagamaan yang memiliki *khittah* melakukan penyelewengan pelaksanaan *khittah* dengan mewujudkan tujuan melalui politik praktis. Sehingga penelitian ini dapat mengeksplorasi konsepsi terkait dengan *khittah* Tarbiyah dan perilaku politik praktis elit dalam lingkaran kekuasaan dimana fenomena tersebut menjadi representasi kajian politik Islam

## 6.2. Saran

Untuk sebuah aktivitas yang tidak sesuai dengan semestinya kita tidak bisa mengharapkan banyak melalui proses pelaksanaan triologi *khittah* oleh DPD Tarbiyah saja, tentu itu menjadi sebuah tugas bersama bagi setiap elemen yang berada pada tataran sosial politik yang berkembang, apalagi keberadaan DPD Tarbiyah tidak bisa juga dilepaskan dari dinamika politik yang ada karena



memang peran Tarbiyah sangat penting dalam menjaga stabilitas dan dinamika sosial politik di Sumatera Barat karena memang modal historis Tarbiyah yang menuntut hal tersebut.

Peran segala pihaklah yang akan menjadikan Tarbiyah secara unsur organisasinya dapat menjalankan seperti yang dicita-citakan oleh leluhur Tarbiyah. Hanya saja jangan sampai dikemudian hari dengan historis organisasi yang besar ini menjadi semakin luntur akibat dari tidak mengambil peran besar dalam menjalankan triologi *khittah* Tarbiyah. Tidak hanya itu, Tarbiyah sebagai organisasi keagamaan sosial kemasyarakatan tentunya harus memiliki formulasi pedoman hidup yang lebih rinci terhadap aturan-aturan yang memang di bentuk untuk menjaga marwah Tarbiyah seperti halnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memang secara ideologi mengatur secara rinci dan jelas dalam melakukan setiap aktivitas yang berhadapan dengan dinamika sosial-politik. Secara institusi Tarbiyah harus turun kembali dalam membangun perjuangan melalui politik kultural.

Fenomena seperti ini, diharapkan pada setiap elemen elit Tarbiyah dalam melakukan aktivitasnya perlu ada pemahaman yang utuh terkait dengan pedoman hidup Tarbiyah sehingga kejadian-kejadian yang dapat merugikan Tarbiyah dikarenakan tidak memiliki pedoman yang kuat tidak terulangi, dalam artian menjalankan organisasi Tarbiyah harus dilandasi dengan dasar ideologi yang kuat mengenai *khittah* Tarbiyah yang diwariskan oleh para ulama Tarbiyah terdahulu.

*Khittah* dan *Ijtihad* politik praktis yang menjadi fenomena menarik dalam penelitian ini adalah kajian fenomenologi dengan menggunakan konsep *khittah*

Tarbiyah dan *ijtihad* politik elit keagamaan dalam politik praktis merupakan sebuah kajian politik Islam dari sudut pandang perilaku politik elit. Namun banyak hal lain dari permasalahan *khittah* dan *ijtihad* politik yang bisa digali lebih mendalam lagi oleh peneliti selanjutnya, yaitu:

Terkait dengan bagaimana sebenarnya *khittah* dan politik dalam ranah ideologis perkembangan demokrasi. *Khittah* memang lahir dari sebuah proses politik. Karena peneliti melihat suburnya politik Islam tidak terlepas dari perkembangan demokrasi dalam hal ini peneliti coba mempertanyakan apakah menjadi pengaruh ketika *khittah* bersentuhan dengan demokrasi. Sehingga menjadi menarik ketika melihat dinamika sosial politik bersentuhan dengan *khittah*. Dengan demikian dapat diteliti lebih jauh dan lebih menarik lagi tentang *khittah* dan politik. Terkhusus dengan fenomena yang saling terkait antara *khittah* Tarbiyah, politik praktis dan elit bisnis dalam lingkaran sosial demokrasi.

